

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah serangkaian kegiatan terencana untuk memperbaiki keadaan masyarakat dari kondisi sebelumnya menuju kehidupan yang lebih baik, atau suatu proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga-lembaga nasional, seperti percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan penanggulangan kemiskinan (Todaro, 2014). Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia memerlukan pembangunan di berbagai sektor perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan yang layak, serta bersaing dengan negara-negara di dunia, termasuk negara-negara maju. Untuk mempercepat pembangunan negara di segala bidang tersebut, tentu saja pemerintah membutuhkan modal yang cukup.

Namun, kemampuan pemerintah untuk mendapatkan modal yang cukup besar untuk mempercepat pembangunan sangat terbatas. Sehingga pemerintah harus menerapkan berbagai kebijakan dan upaya ekstra untuk mendapatkan lebih banyak dana untuk kegiatan pembangunan

Investasi merupakan pendorong penting pembangunan ekonomi, yang diharapkan dapat memberikan keuntungan. Menurut Sukirno (1997:107), investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanaman modal atau perusahaan untuk

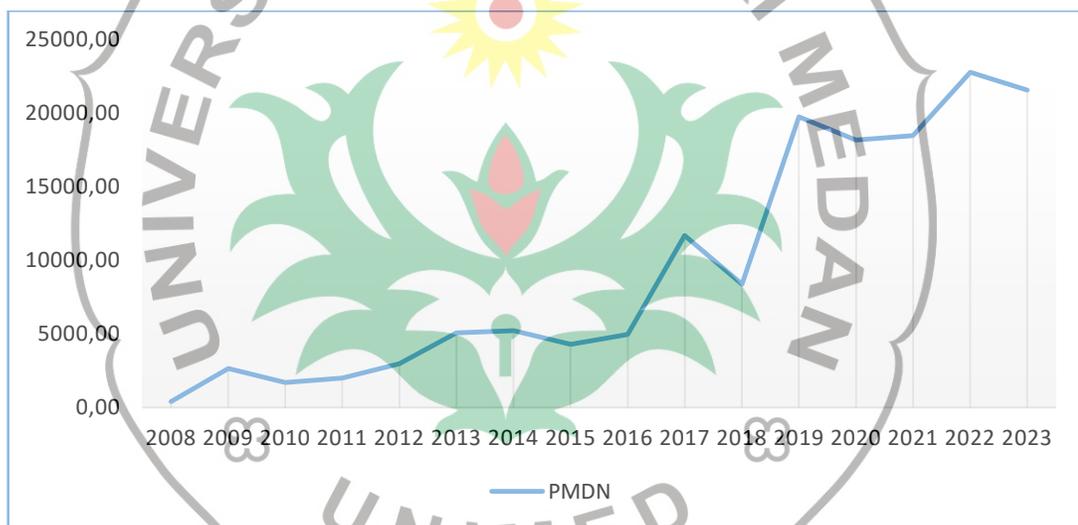
membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang atau jasa yang tersedia dalam perekonomian. Penanaman modal semakin mendorong pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi dan pengetahuan, serta menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (Supancana, 2006 : 10).

Peluang investasi di Indonesia sangat besar, hal ini disebabkan oleh adanya sumber daya alam yang melimpah, luas daratan dan lautan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, serta sumber daya manusia yang banyak dan berkualitas. Meskipun demikian, Indonesia tidak lepas dari permasalahan ekonomi pada umumnya. Oleh karena itu yang menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah dibutuhkan investasi. Investasi penting bagi pertumbuhan ekonomi karena kontribusi yang diberikan. Adapun alokasi modal yang kita kenal sebagai investasi, utamanya berasal dari dua sumber yakni Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Menurut undang-undang No.25 tahun 2007, PMDN adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan PMA merupakan kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Baik PMDN dan PMA sebenarnya sama-sama memberikan keuntungan bagi pembangunan

suatu Negara. Namun, pemberdayaan PMDN lebih diutamakan hal ini karena apabila modal diharapkan dari bantuan luar negeri, maka hal itu sangat terbatas dan sangat bersifat hati-hati. (Kuncoro, 2003) menyatakan “Hipotesis dasar teori ketergantungan adalah (a) PMA dan bantuan luar negeri meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang (5-20 tahun) menghambat pertumbuhan ekonomi, (b) makin banyak negara bergantung pada PMA dan bantuan luar negeri makin besar perbedaan penghasilan. Oleh karena itu, pemberdayaan PMDN merupakan hal yang lebih penting untuk dilakukan”. Penting bagi pemerintah untuk memperkuat penanaman modal dalam negeri sebagai sumber pendapatan dalam penerapan perekonomian berkeadilan. Maka sangat diperlukan peningkatan investasi dalam bentuk PMDN karena dapat berdampak pada lingkungan sekitar untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kemandirian kegiatan investasi dalam negeri juga merupakan langkah maju yang berguna untuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri.

Sama halnya seperti Sumatera Utara yang merupakan satu diantara beberapa provinsi paling besar di Indonesia serta menjadi wilayah paling luas di pulau Sumatera. Jika dilihat dari potensi yang dimiliki, Provinsi Sumatera Utara memiliki peluang investasi yang cukup baik. Provinsi Sumatera Utara mempunyai sumber daya alam yang cukup melimpah, seperti bahan mentah hasil dari perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan yang dapat dimanfaatkan untuk membangun industri, serta sumber daya manusia yang cukup memadai. Selain itu, wilayah Sumatera Utara juga

mempunyai potensi di sektor lain seperti pariwisata, pertambangan, perindustrian dan jasa, yang seharusnya mampu menarik investor untuk berinvestasi yang nantinya akan dapat membantu pembangunan di Sumatera Utara itu sendiri. Berikut data perkembangan tingkat realisasi PMDN di Sumatera Utara :



Grafik 1.1 Realisasi Investasi PMDN Sumatera Utara Tahun 2008-2023

Jika dilihat pada grafik 1.1 diatas, perkembangan PMDN di Sumatera Utara cenderung berfluktuasi dengan trend meningkat. Dapat diketahui pada tahun 2008 merupakan tahun dengan nilai PMDN terendah selama tahun penelitian yakni senilai 391,33 milyar rupiah. Hal ini merupakan dampak dari terjadinya krisis keuangan global yang menyebabkan kurangnya kepercayaan investor untuk melakukan investasi dalam negeri di Sumatera Utara. Selain itu, terjadi nya krisis energy yang belum teratasi dan buruknya infastruktur di sejumlah daerah Sumatera Utara masih jadi persoalan.

Persoalan energy dan infrastruktur juga menjadi beban pengusaha sehingga mereka enggan menanamkan investasinya di Sumatera Utara.

Pada tahun-tahun berikutnya PMDN di Sumatera Utara kembali berfluktuasi hingga pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang cukup tajam yakni nilai PMDN sebesar 19.749 milyar rupiah. Peningkatan ini merupakan dampak positif yang dihasilkan dari pelaksanaan pertama kali RENSTRA yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provinsi Sumatera Utara untuk kurun waktu 2019-2023 dalam mewujudkan iklim investasi (penanaman modal dan pelayanan perizinan) yang berdaya saing untuk mendukung perekonomian di provinsi Sumatera Utara. Adapun beberapa program dan kegiatan yang dilakukan seperti program peningkatan promosi dan kerja sama investasi, program peningkatan pelayanan perizinan, program pemetaan potensi dan peluang investasi daerah provinsi Sumatera Utara dan program-program lainnya yang menambah kepercayaan para investor untuk berinvestasi. Hingga pada tahun-tahun selanjutnya PMDN di Sumatera konsisten meningkat hingga menyentuh angka 21.574,00 miliar pada tahun 2023. Peran pemerintah sangat di perlukan dalam hal pengerahan modal. Dibutuhkan usaha, upaya, kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan untuk menciptakan iklim investasi yang menggairahkan untuk menarik para investor. Berdasarkan grafik 1.1 tersebut apabila dilihat dari sisi trend waktu PMDN di Sumatera Utara mengalami peningkatan, sehingga perekonomian terkait PMDN menunjukkan kinerja yang produktif atau bagus dalam pembangunan di Sumatera

Utara. Namun, jika dilihat dari sisi realisasi PMDN masih menjadi permasalahan karena realisasi PMDN tidak sesuai dengan rencana atau target yang diharapkan.

Tahun	Rencana	Realisasi
2008	875.881,35	391.333,72
2009	2.929.808,36	2.644.965,26
2010	484.130,56	1.703.056,37
2011	4.693.168,12	2.004.055,78
2012	2.847.149,82	2.970.186,19
2013	3.026.164,79	5.068.881,40
2014	7.091.861,40	5.231.905,85
2015	11.427.879,50	4.287.417,30
2016	100.966.909,10	4.954.829,29
2017	29.919.564,00	11.683.639,20
2018	7.509.325,70	8.371.820,30
2019	-	19.748.995,10
2020	-	18.189.528,40
2021	-	18.484.498,20
2022	19.600.000,00	22.789.227,30
2023	-	21.573.976,70

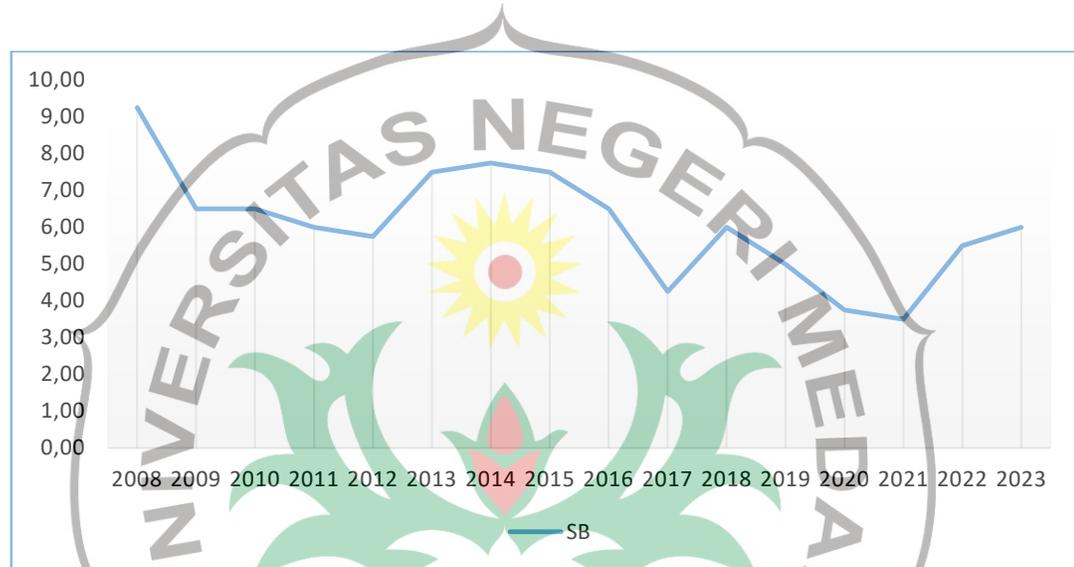
Tabel 1.1 Data Rencana dan Realisasi PMDN di Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hampir 80% pada tahun penelitian ini realisasi PMDN di provinsi Sumatera Utara tidak mencapai rencana atau target yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan beberapa tahun, seperti tahun 2016 realisasi PMDN sangat jauh dari rencana atau target yang diharapkan. Pada tahun 2019-2021 dan tahun 2023, data yang diperoleh dari BPS Sumatera Utara menunjukkan pemerintah tidak menetapkan rencana atau target PMDN yang ingin dicapai. Dari data tersebut juga menunjukkan pentingnya untuk meningkatkan PMDN di Sumatera Utara agar dapat memenuhi rencana atau target yang diharapkan sehingga pembangunan

ekonomi di Sumatera Utara juga akan meningkat. Untuk meningkatkan kegiatan investasi atau penanaman modal dalam negeri banyak factor yang sangat berpengaruh dan menentukan baik buruknya kegiatan investasi di suatu Negara atau daerah.

(Prasetyo,2009) menjelaskan bahwa ada beberapa factor yang mempengaruhi penanaman modal dalam negeri diantaranya yaitu suku bunga, inflasi dan PDRB. Salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan penanaman modal dalam negeri adalah tingkat suku bunga. Menurut Mishkin (2010 :4), suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan atas dana pinjaman pada periode tertentu baik perbulan atau pertahun yang biasanya dinyatakan dalam persentase. Situs resmi Bank Indonesia menyebutkan bahwa suku bunga merupakan kebijakan Bank Indonesia yang dikeluarkan untuk mengatur keuangan dengan berkaca pada kondisi perekonomian suatu Negara. Menurut aliran klasik bahwa investasi merupakan fungsi dari suku bunga. Suku bunga merupakan landasan atau ukuran bagi layak atau tidaknya suatu usaha atau investasi (Dewi, 2015). Pergerakan tingkat suku bunga akan mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi, hal ini karena ketika suku bunga tinggi dapat membuat biaya pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga mendorong investor untuk mengurangi investasi mereka. Sebaliknya, suku bunga yang rendah dapat mendorong investor untuk meningkatkan investasi mereka karena biaya pinjaman lebih murah.

Berikut ini adalah data perkembangan suku bunga di Indonesia tahun 2008-2023 :



Grafik 1.2 Perkembangan Suku Bunga di Indonesia Tahun 2008-2023

Berdasarkan grafik 1.2 di atas dapat dilihat bahwa tingkat suku bunga mengalami kondisi fluktuasi dengan trend menurun dengan rata-rata suku bunga sebesar 6,20 %. Suku bunga tertinggi terjadi pada tahun 2008 yakni sebesar 9,25 %. Hal ini diakibatkan pada tahun 2008 terjadi krisis keuangan global. BI terpaksa memberlakukan kebijakan moneter menaikkan suku bunga pada saat pemerintah hendak menaikkan harga BBM Subsidi untuk menekan ekspektasi inflasi. Namun dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dampak krisis keuangan global tersebut hanya sementara. BI berhasil melakukan pemangkasan suku bunga sejalan dengan melandainya perekonomian global serta domestic hingga pada tahun-tahun berikutnya tingkat suku bunga cenderung mengalami penurunan. Seperti yang diketahui bahwa pada tahun 2020 menjadi tahun yang menantang bagi Indonesia sejak munculnya pandemic virus Covid-

19 yang memberikan tekanan kondisi ekonomi dan social. Dalam menghadapi situasi tersebut BI menempuh kebijakan akomodatif melalui pemotongan suku bunga yakni menjadi sebesar 3,75%. Keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga dan sebagai langkah lanjutan untuk mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemic Covid-19. Dengan perkiraan yang sama BI kembali melakukan pemotongan suku Bunga menjadi 3,50% pada tahun 2021 dan ini merupakan suku bunga terendah dalam enam belas tahun terakhir.

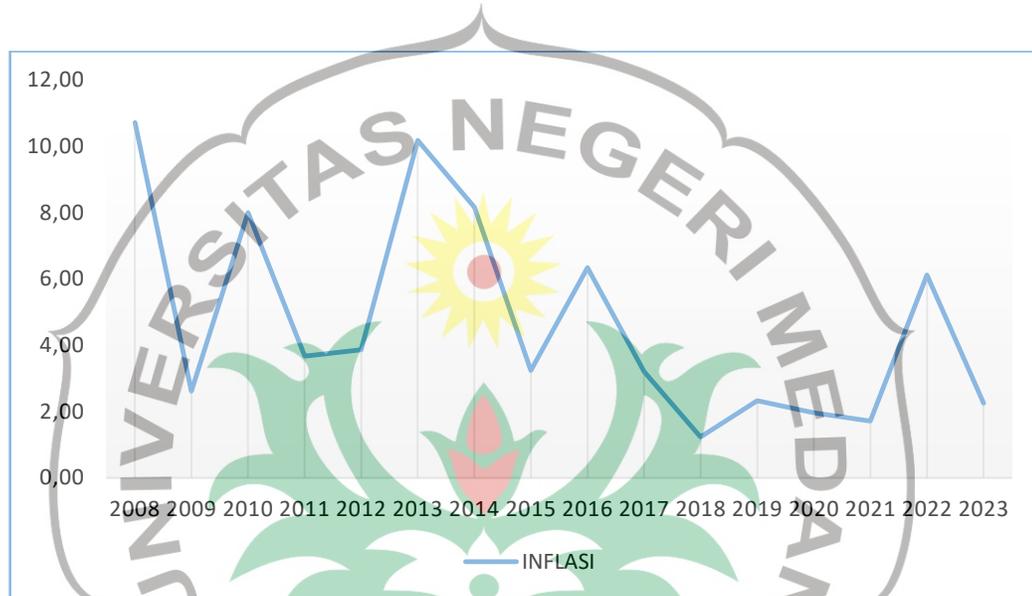
Penurunan atau peningkatan suku bunga tersebut akan berdampak pada tingkat realisasi PMDN di Provinsi Sumatera Utara yang terjadi pada tahun 2008-2023. Dalam beberapa kasus pada saat terjadi kenaikan tingkat suku bunga justru tingkat PMDN juga mengalami kenaikan. Seperti pada tahun 2021 ke tahun 2022 tingkat suku bunga mengalami kenaikan sebesar 2% dan tingkat PMDN yang terjadi di Sumatera Utara juga ikut mengalami kenaikan yakni menjadi 22.789,2 milyar rupiah pada tahun 2022.

Fenomena ini menggambarkan pengaruh yang positif antara tingkat suku bunga terhadap PMDN. Hal ini tidak sesuai dengan teori investasi yang kemukakan oleh Keynes (Nanga, 2005) yang menyatakan bahwa hubungan antara suku bunga dengan PMDN adalah negatif, yaitu apabila suku bunga turun akan menyebabkan permintaan investasi meningkat dan sebaliknya akan berlaku jika suku bunga mengalami kenaikan maka permintaan investasi akan menurun. Hal ini karena investor akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi masih lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga yang harus dibayarkan untuk dana

investasi tersebut yang merupakan ongkos dari penggunaan dana (cost of capital). Semakin rendah tingkat bunga maka investor akan lebih terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga semakin kecil. Teori tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi & Luh Gede (2017) menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penanaman modal dalam negeri, yang diartikan ketika tingkat suku bunga mengalami peningkatan maka akan menurunkan Penanaman Modal Dalam Negeri di provinsi Bali dan begitu juga sebaliknya apabila tingkat suku bunga mengalami penurunan maka Penanaman Modal Dalam Negeri di provinsi Bali akan meningkat.

Selain tingkat suku bunga, inflasi juga merupakan faktor yang sama pentingnya yang mempengaruhi penanaman modal dalam negeri. Inflasi adalah kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam perekonomian dari satu periode ke periode lainnya (Sukirno, 2008). Tingkat inflasi yang terjadi pada suatu negara dan wilayah tentu saja mempengaruhi keputusan investasi para investor, karena hal ini berkaitan dengan biaya investasi yang dikeluarkan oleh investor. Para pelaku bisnis atau investor mempertimbangkan untuk berinvestasi atau tidak dengan melakukan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian suatu negara atau daerah di masa depan. Seorang investor cenderung melakukan investasi ketika inflasi dalam kondisi stabil. Karena dengan inflasi yang stabil, tingkat harga barang biasanya tidak naik secara signifikan. Investor merasa lebih aman atau terjamin untuk berinvestasi ketika inflasi di suatu negara stabil atau rendah.

Berikut data tingkat inflasi di provinsi Sumatera Utara :



Grafik 1.3 Tingkat Inflasi di Sumatera Utara Tahun 2008-2023

Pada grafik 1.3 di atas menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi pada tahun 2008-2023. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 10,72 %, dimana tingkat inflasi tersebut sudah termasuk dalam kategori inflasi sedang atau menengah karena lebih dari 10%. Tingginya inflasi tersebut disebabkan karena pada tahun tersebut terjadi kenaikan BBM domestic, konversi minyak tanah ke LPG, dan tingginya harga komoditas internasional yang juga merupakan dampak dari terjadinya krisis keuangan global. Pada tahun-tahun berikutnya tingkat inflasi cenderung berada pada jangka di bawah 10% yang menandakan bahwa tingkat inflasi yang terjadi masih dalam kategori ringan atau rendah. Kemudian pada tahun 2013, tingkat inflasi yang terjadi di Sumatera Utara kembali meningkat tajam mencapai angka 10,18%. Angka tersebut lebih tinggi dari

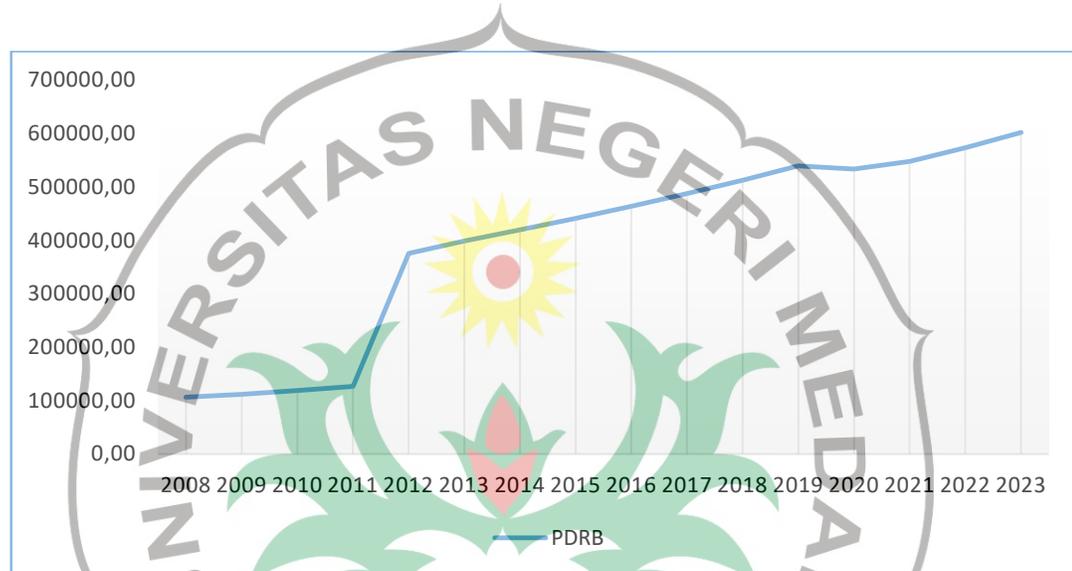
angka nasional yang sebesar 8,38 %. Kenaikan ini diakibatkan karena pada tahun 2013 berlakunya kebijakan penyesuaian Tarif Dasar Listrik, kenaikan harga LPG, kenaikan harga BBM bersubsidi dan penyesuaian tariff angkutan yang ikut mempengaruhi perekonomian. Menghadapi tantangan tersebut, koordinasi tim pengendalian inflasi daerah Sumatera Utara terus melakukan perkuatan dan mengambil langkah-langkah antisipatif dan berhasil menurunkan angka inflasi pada tahun-tahun berikutnya yang cenderung berada pada jangka dibawah 10% yang menandakan bahwa tingkat inflasi yang terjadi masih dalam kategori ringan dan inflasi terendah terjadi pada tahun 2018 yakni 1,23% karena terjaganya tekanan harga dari sisi permintaan dan administered prices. Dibutuhkan peran pemerintah, BI dan lembaga lainnya dalam mengendalikan inflasi agar tetap terjaga atau stabil, karena hal ini akan sangat mempengaruhi perekonomian khususnya PMDN.

Berdasarkan data tersebut juga dapat dilihat dalam beberapa kasus inflasi yang meningkat juga diikuti dengan meningkatnya PMDN yang terealisasikan di provinsi Sumatera Utara. Seperti pada tahun 2018 ke tahun 2019 inflasi yang meningkat sebesar 1,1%, justru membuat PMDN juga ikut mengalami peningkatan yakni menjadi 19.749,00 milyar rupiah pada tahun 2019. Fenomena ini menggambarkan pengaruh yang positif antara tingkat inflasi terhadap PMDN. Hal ini tidak sejalan dengan teori Sukirno (2011) yang mengatakan bahwa inflasi dan PMDN berhubungan negatif, yakni apabila terjadi situasi tingkat inflasi yang tinggi maka hal ini akan mengakibatkan berkurangnya jumlah investasi dikarenakan inflasi yang tinggi akan menekan biaya

investasi menjadi lebih tinggi dan para investor biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Teori ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bakti & Maria (2018) yang menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Investasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi inflasi akan mengakibatkan investasi di Lampung akan semakin menurun dan berlaku juga sebaliknya

Dalam melakukan kegiatan investasi atau penanaman modal dalam negeri, investor akan melihat kemampuan daya beli masyarakat sebagai tujuan utama sebagai sasaran pasar yang akan dituju. Pencapaian keberhasilan perekonomian diwujudkan dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang pertumbuhannya berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Todaro (2002) mendefinisikan PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah. Menurut Badan Pusat Statistik, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi Sumber Daya Alam dan factor produksi daerah tersebut. Kecenderungan masyarakat untuk melakukan investasi yang bersumber dari meningkatnya pendapatan nasional berupa PDB atau PDRB dapat menjadi stimulus bagi kegiatan penanaman modal dalam negeri (Arsyad, Lincoln 1999).

Berikut data perkembangan PDRB di Sumatera Utara :



Grafik 1.4 Perkembangan PDRB di Sumatera Utara Tahun 2008-2023

Grafik 1.4 diatas menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan Produk Domestik Regional Bruto sebesar 1,07% yakni pada tahun 2019 sebesar 539.513,85 milyar rupiah menjadi sebesar 533.746,36 milyar rupiah pada tahun 2020. Penurunan ini merupakan dampak terjadinya pandemic covid 19 pada saat itu yang mengganggu hampir semua aktivitas ekonomi sehingga aktivitas ekonomi tidak dapat berjalan dengan optimal. Upaya pengendalian pandemic covid 19 terus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah bersama seluruh stakeholders, termasuk semua masyarakat Sumatera Utara. Pemulihan ekonomi seperti penguatan fasilitas kesehatan, melindungi kelompok masyarakat rentan dan dunia usaha (UMKM), mengurangi tekanan sector keuangan, melanjutkan

program social dengan memberikan bantuan/subsidi bagi masyarakat miskin dan lainnya terus dilakukan agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Sumatera Utara tidak kembali mengalami kontraksi seperti pada tahun 2020. Hingga pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara kembali mengalami kenaikan sebesar 2,61% yang menunjukkan pemulihan ekonomi berhasil dilakukan dan berlanjut hingga tahun 2023 dimana PDRB Sumatera Utara meningkat hingga mencapai 602.235,95 milyar rupiah.

Kenaikan PDRB di Provinsi Sumatera Utara tersebut tidak sepenuhnya juga diimbangi dengan kenaikan tingkat PMDN yang terealisasikan di provinsi Sumatera Utara tahun 2008-2023. Karena dalam beberapa kasus seperti pada tahun 2017 ke tahun 2018 dimana PDRB di provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan, PMDN di provinsi Sumatera Utara justru mengalami penurunan sebesar 4.304,70 milyar rupiah. Fenomena ini menggambarkan pengaruh yang negatif antara PDRB terhadap PMDN.

Hal ini tidak sesuai dengan teori yang kemukakan oleh Keynes yang menyatakan tingkat pertumbuhan PDB/PDRB yang baik akan memberikan efek yang positif bagi negara karena akan menarik para investor untuk berinvestasi. Hal ini karena peningkatan PDRB akan meningkatkan permintaan konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa yang akan memberikan spekulasi keuntungan pada investor (Shahzad,2013). Teori tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Munawaroh (2018) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap tingkat PMDN di Jawa Tengah pada periode tahun 2000-2017. Yang berarti apabila

terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan oleh PDRB maka akan terjadi peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri dan apabila terjadi penurunan PDRB maka PMDN juga akan ikut menurun. Dengan hasil yang demikian maka perlu adanya kerja keras pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan output nilai PDRB sehingga akan banyak penanaman modal dalam negeri yang dilaksanakan.

Modal merupakan faktor yang sangat diperlukan ketika melakukan suatu pembangunan untuk mendorong perekonomian yang lebih baik di suatu Negara atau daerah. Maka dari itu, sangat perlu untuk memahami dan mengetahui apa saja faktor-faktor yang bisa membuat daya tarik penanaman modal dalam negeri meningkat. Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih mendalam mengenai pengaruh Suku Bunga, Inflasi dan PDRB terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan judul :“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri Di Provinsi Sumatera Utara”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Pemerintah provinsi Sumatera Utara masih memerlukan dana untuk melakukan pembangunan

2. Selama tahun 2008-2023 Penanaman Modal Dalam Negeri di Sumatera Utara mengalami fluktuasi
3. Suku bunga mengalami fluktuasi menyesuaikan kondisi perekonomian yang terjadi
4. Inflasi yang terjadi di Sumatera Utara tidak stabil yang ditandai dengan naik turunnya tingkat inflasi setiap tahun
5. Peningkatan PDRB di Sumatera Utara tidak dibarengi peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri di Sumatera Utara

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut :

1. Objek penelitian adalah provinsi Sumatera Utara tahun 2008-2023
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan factor yang mempengaruhinya yaitu suku bunga, inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sumatera Utara tahun 2008-2023

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara?

2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara?
3. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara?
4. Apakah suku bunga, inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Sumatera Utara
4. Untuk mengetahui pengaruh Suku Bunga, Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Sumatera Utara

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat lebih memahami serta bertambahnya ilmu dan wawasan terkait kajian yang diteliti

2. Bagi Masyarakat/Pemerintah

Menjadi salah satu referensi bagi masyarakat/pemerintah daerah untuk menentukan langkah atau kebijakan bagi kemajuan wilayah provinsi Sumatera Utara

3. Bagi Akademisi

Sebagai bahan ajar sekaligus sebagai penambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi khususnya yang mempelajari Ilmu Ekonomi dan para ilmuwan dan peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dan tertarik untuk mempelajari mengenai topic yang sama.

4. Bagi Investor

Hasil riset ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan para investor dalam pengambilan keputusan terkait dengan pelaksanaan investasi, khususnya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

